

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tidak sulit untuk bersepakat bahwa hadirnya sebuah diskursus dapat memberikan suatu keterarahan, mengenai gambaran pokok sebuah reformasi politik menuju tatanan politik nasional yang demokratis adalah suatu tugas dan pekerjaan besar yang penuh dengan tantangan. Sungguh sebuah proyek raksasa yang menghadapi ujian dan jebakan. Tidak sederhana yang dibayangkan oleh sebagian besar para aktivis dan politisi bahwa demokrasi akan tumbuh subur dan cepat di Indonesia apabila semua pihak turut terlibat aktif dalam seluruh penyelenggaraannya. Demokrasi yang diharapkan segera hadir dengan sosoknya yang utuh dan sejati, ternyata tidak muncul. Bahkan demokrasi perlemen, terpimpin, pancasila, masa reformasi, hingga sekarang masih mengandung pertanyaan serius terhadap masa depannya.

Proses menuju demokrasi yang secara optimal sungguh membutuhkan proses yang rumit dan panjang. Proses demokratisasi itu harus melewati suatu diskursus yang curam dan terjal, sebelum mencapai tahap berikutnya yakni era konsolidasi demokrasi oleh semua pihak. Lewat tahap-tahap ini, barulah harapan akan lahirnya demokrasi niscaya akan dapat diwujudkan, yakni demokrasi yang sudah berakar pada struktur dan prosedural politik yang betul-betul mengarah pada substansi demokrasi itu sendiri.

Meskipun ada bibit-bibit substansial kehidupan demokratis, masih banyak yang perlu dikembangkan agar demokrasi Indonesia menjadi betul-betul substansial. Demokrasi Indonesia masih ada defisit cukup besar. Unsur-unsur demokrasi yang nyata-

nyata menurut para peserta diskursus politik di negara ini yang seharusnya ada masih kempas-kempis, banyak yang digrogoti, banyak tinggal simbolnya, untuk sebagian masih berkesan “demokrasi seolah-olah”.

Dilihat dari sudut etika politik, peningkatan kadar kedemokratisasian kehidupan politik Indonesia tidak perlu dilaksanakan dengan model banting stir, melainkan cukup dengan cara mengoreksi kepincangan dan distorsi intrinsik dalam dinamika sistem politik sekarang, serta dengan mengembangkan dan membuat menjadi nyata lembaga-lembaga demokratis yang ada.

Etika politik tidak menentukan langkah-langkah mana yang harus diambil oleh pemerintah maupun masyarakat dalam meningkatkan kehidupan demokratis di tanah air. Tetapi ia dapat menyuarakan tuntutan agar kehidupan demokratis terus-menerus ditingkatkan, sesuai dengan situasi dan kondisi. Etika politik juga menegaskan bahwa yang berhak menentukan arti kata ‘sesuai’ itu bukan pemerintah sendirian, melainkan pemerintah dalam diskursus demokratis baik bersama dengan badan-badan perwakilan rakyat sebagaimana terungkap dalam berbagai bentuk diskursus tertulis (pers, publikasi lain) dan lisan (seminar, televise-i, radio).

Begitu pula kontrol terhadap pemerintah harus secara efektif untuk dijalankan sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan dan norma-norma itu sendiri berupa norma hukum. Norma hukum berarti, ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana ditetapkan dalam penyelenggaraan tujuan bernegara yang meliputi; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan.

Dalam kaitan ini Franz Magnis-Suseno mencoba merumuskan dengan terinci manakalah ciri-ciri negara demokrasi. Akan tetapi *claim* universal demokrasi langsung harus direlatifkan kembali karena beberapa alasan; bahwa tuntutan demokatisasi sendiri mengandaikan tersedianya syarat-syarat politik dan sosial yang memungkinkannya; menuntut lembaga-lembaga untuk mengoperasionalkan kehidupan demokratis dan demokrasi beserta ciri-cirinya selalu harus dipahami secara kontekstual dan dinamis. Artinya, arti kebebasan demokratis tidak dapat didefinisikan secara operasional diluar konteks masyarakat yang bersangkutan. Dan operasionalisasi unsur-unsur negara demokratis berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Mekanisme-mekanisme demokratis yang sudah optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat menjadi penghambat dan *counter productive* apabila tidak dibaharui sesuai dengan kemajuan masyarakat. Sehingga bagaimana menghadapi tuntutan-tuntutan demokratis itu pada tantangan perealisasi demokrasi di Indonesia. Maka perlu membangun cita demokrasi dan nomokrasi sehingga mewujudkan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara ke depan yang lebih baik.

5.2 Saran

Dari tulisan ini penulis memberikan beberapa usul saran yang perlu diperhatikan bagi perkembangan negara Indonesia yang sementara bergulat mencapai titik transisi demokratis. Gagasan dan alur pemikiran adalah bertolak dari konsep pemikiran yang diketengahkan oleh Franz Magnis-Suseno, yakni sebuah diskursus demokrasi yang

dibangun dari peta perpolitikan bangsa Indonesia sendiri sejak pra kemerdekaan sampai dengan era reformasi.

Diskursus demokrasi hingga dewasa ini belum sepenuhnya mencapai hasil yang maksimal, walaupun tak dapat dipungkiri, bahwa niat baik dari berbagai pihak demi mengusahakan terwujudnya suatu tatanan demokrasi yang ideal bagi bangsa Indonesia terus diupayakan. Kepentingan pribadi maupun kelompok selalu mengarsibawahi aksi politik yang dicanangkan. Sisi demokratis yang dicita-citakan tak pernah naik kepermukaan alur hidup bangsa. Lagi dan lagi, kepentingan pribadi dan kelompok menjadi batu pijakan dalam jabatan kepemimpinan.

Mengenai fakta riil bangsa mengenai diskursus demokrasi ini, muncul berbagai pihak dengan berbagai aneka gagasan yang kompleks demi mengusahakan adanya secuil perubahan demi terealisasinya gagasan demokrasi yang ideal dalam tumbuh bangsa Indonesia. Salah satu diantaranya adalah Franz Magnis-Suseno sebagai seorang rohaniwan yang nota bene sebagai filsuf sekaligus teolog banyak memberi inspirasi pemikiran intelektualnya baik di bidang filsafat, etika, teologi, moral dan juga sangat mempedulikan situasi perpolitikan bangsa Indonesia, dan juga ikut terlibat dalam segala persoalan-persoalan bangsa dan memberi kontribusi pemikiran demi membangun bangsa ini. Sehingga perwujudan demokrasi politik sendiri adalah sebuah proses yang memang tidak pasti, akan tetapi tentu tidak terlepas dari faktor-faktor struktural, maka unsur hakiki setiap demokrasi sungguhan adalah kontrol terhadap pemerintah oleh badan perwakilan rakyat serta keterbukaan proses-proses politik terhadap pengamatan, tanggapan dan seprluhnya kritik masyarakat melalui pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Sekiranya tulisan ini menjadi bahan permenungan bagi siapa saja tanpa terkecuali untuk melihat secara lebih mendalam gagasan demokrasi di Indonesia. Pemikiran Franz Magnis-Suseno yang dianggap penulis kirannya membuka cakrawalah berpikir setiap orang untuk secara pribadi dengan caranya masing-masing mengusahakan pembangunan demokrasi yang niscaya ideal bagi bangsa Indonesia yang demokratis dengan berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

PUSTAKA PRIMER

Magnis-Suseno, Franz, *Memantapkan Demokrasi Pancasila, sebuah telah filosofis; pidato di ucapkan pada rapat senat terbuka luar biasa sekolah tinggi filsafat Driyarkara pengukuhan jabatan guru besar tetap filsafat sosial di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1994.*

_____, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.

_____, *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme; Bunga Rampai Etika Aktual*, Jakarta; Penerbit Kompas, 2015

PUSTAKA SEKUNDER

Magnis-Suseno, Franz, *Etika Sosial; buku panduan Mahasiswa PB I- PB VI*, Jakarta: Gramedia pustaka Utama

_____, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama 1987.

_____, *Demokrasi Sebagai Sebuah Proses Pembebasan: Tinjauan Filosofis dan Historis*, Dari Hasil Seminar Sehari dengan Tema Agama dan Demokrasi

_____, *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 1992

_____, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Datus, Deo Arcy, *Filsafat Politik, Maumere*: Penerbit Ledalero

Baghi, Felix, *Kewarganegaraan Demokratis; Dalam Sorotan Filsafat Politik*, Maumere; Penerbit Ledalero 2009

Lubis, Mockthar, ***Demokrasi: klasik dan Modern***. Jakarta: Yayasan Obor, 2005.

Budiardjo, Meriam, ***Dasar-dasar Ilmu Politik***, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002

Kartasapoetra, G., ***Demokrasi dan Hak-Hak Azasi Manusia***, Bandung: Armico, 1982

Dede Rosyada, A. Ubaidillah, Abdul Rozak, Wahdi Sayuti, M. Arskal Salim GP (Tim ICCE UIN Jakarta), ***demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani***, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000.

Joeniarto, SH, ***Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara***, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990.

Diane Revitch & Abigail Thernstrom (Ed.), ***The Democracy Reader: Classic and Modern Speeches, Essay, Poems, Declaration, and Document on Freedom and Human Right Worldwide; Demokrasi: Klasik & Modern, Tulisan Tokoh-Tokoh Ulung Sepanjang Masa***, Hermoyo (penerjemah), Jakarta: Yayasan Oborr Indonesia, 2005.

Fareed Zakaria, ***Bangkitnya Demokrasi yang Tak Liberal***, dalam Yusi A. Pareanom dan A.. Zaim Rofigi (penerjemah), ***Amerika dan Dunia Memperdebatkan Bentuk Baru Politik Internasional***, Jakarta: Obor, 2005.

Stanlay I. Stuber and Claud D. Nelson, ***Implementing Vatican II In Your Community***, Guild Press: New York Association Press, 1967.

Satya P. Kanan, ***Encyclopaedia of Human Rights and Social Justice, Vol. IV: Global Perspective***, New Delhi: Dominant Publishers and Distributors, 2006.

Aristoteles, ***Politik (La Politica)***, diterjemahkan oleh Syamsur Irawan Kharie, Jakarta: Visimedia, 2007.

Aidul Fatriciada Azhari, ***Menemukan Demokrasi***, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.

Helbert Feith, ***Soekarno dan Milter dalam Demokrasi Terpimpin***, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Ahmad A. Sofyan & M. Roychan Masjid, ***Gagasan Cak Nur tentang Negara & Islam***, Yogyakarta: Titian Ilahi press, 2003

Aep Saefulloh Ftah, ***Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru – Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional***, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Gene Sharp, ***Menuju Demokrasi Tanpa Kekerasan***, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Hatta, Mohammad, ***Kumpulan Pidato dari Tahun 1942 s.d.1949***, disusun oleh I. Wangsa Widjaja dan Meutia F. Swasono, Jakarta: Yayasan Idayu, 1981.

Asshiddiqie, Jimly, ***Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia***, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mali, Mateus (Ed.), ***Perjumpaan Pancasila dan Kristianitas (Reposisi Relasi Negara dan Agama dalam Masyarakat Plural)***, Yogyakarta: Lamalera, 2008

Ajurdi, Fajlurrahman, ***Teori Negara Hukum***, Malang: Sentara Press, 2016